

Overview I-Account APBN

Pendapatan

Rp5,7 T (365,0%)
▲34,7% (yoy)

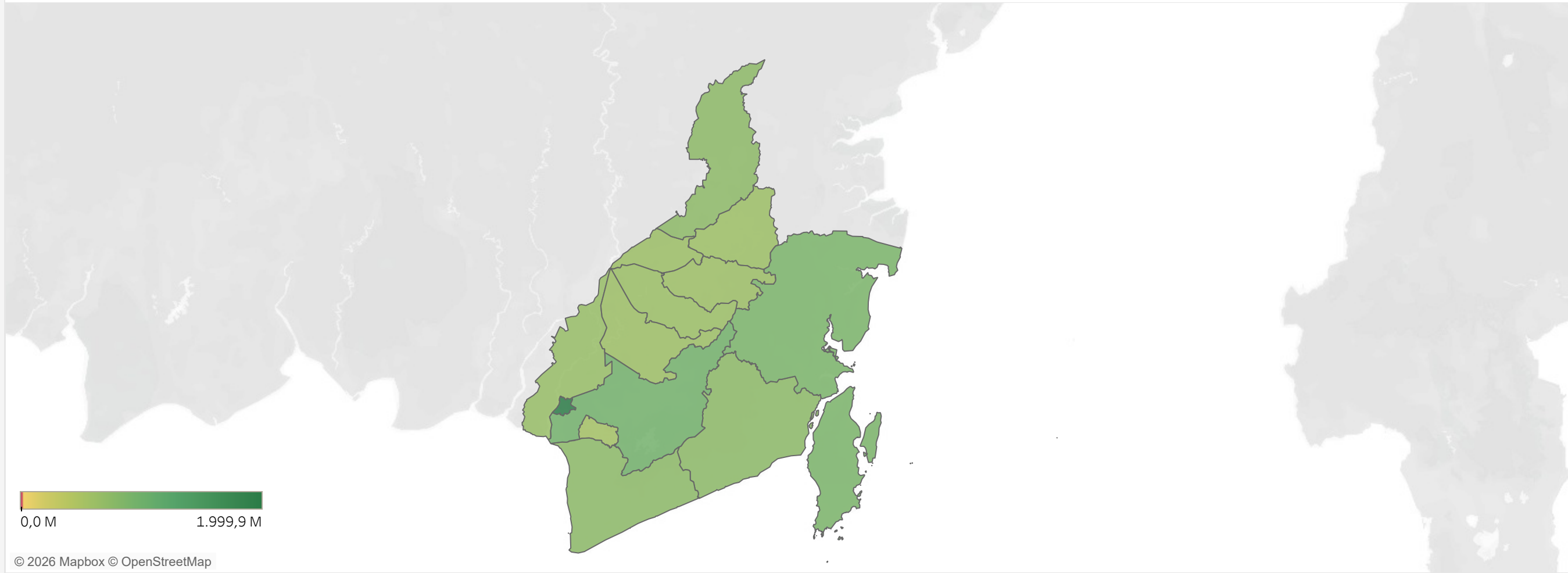
Belanja

Rp12,6 T (42,1%)
▼-9,6% (yoy)

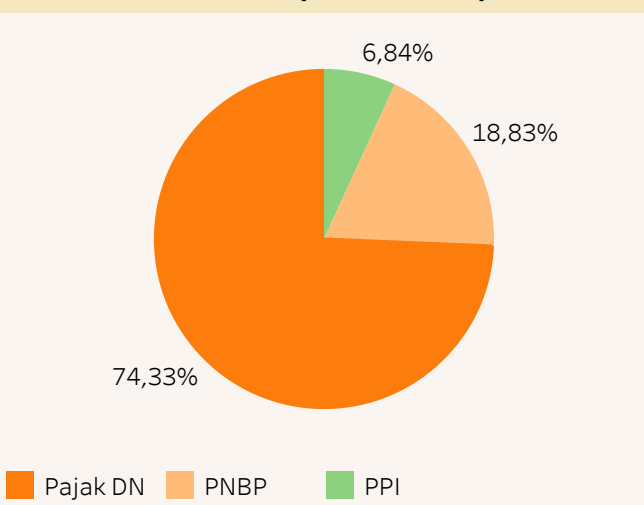
Defisit

Rp-6,9 T (24,4%)
▼28,8% (yoy)

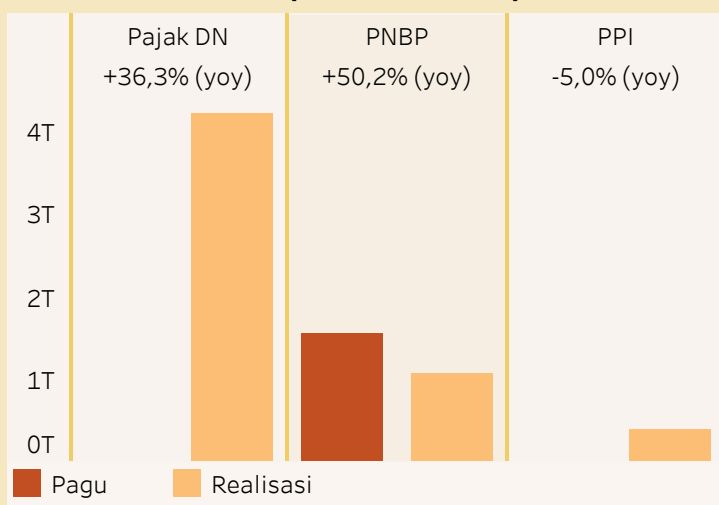
Peta Realisasi Belanja Negara per Wilayah



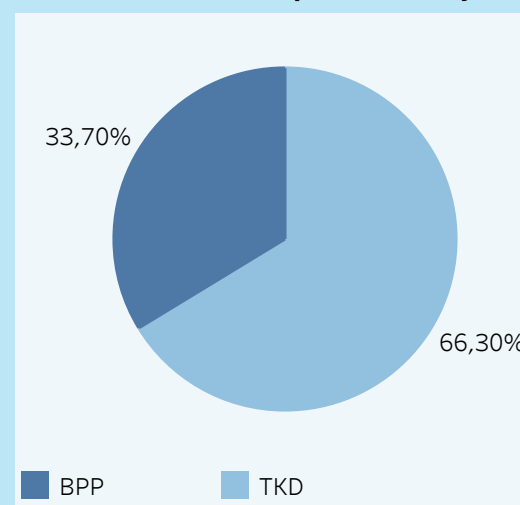
Persentase Komposisi Pendapatan



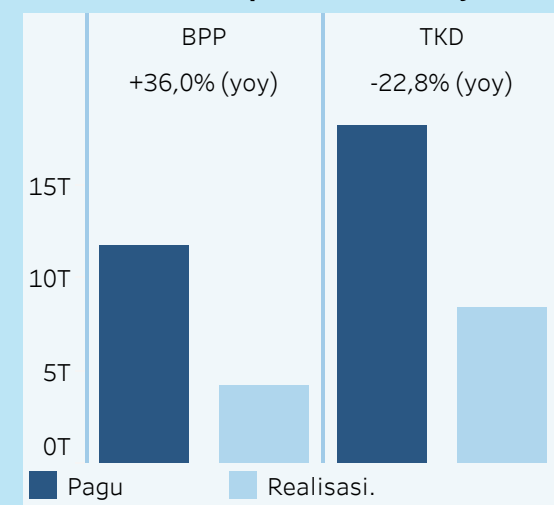
Realisasi per Jenis Pendapatan



Persentase Komposisi Belanja



Realisasi per Jenis Belanja



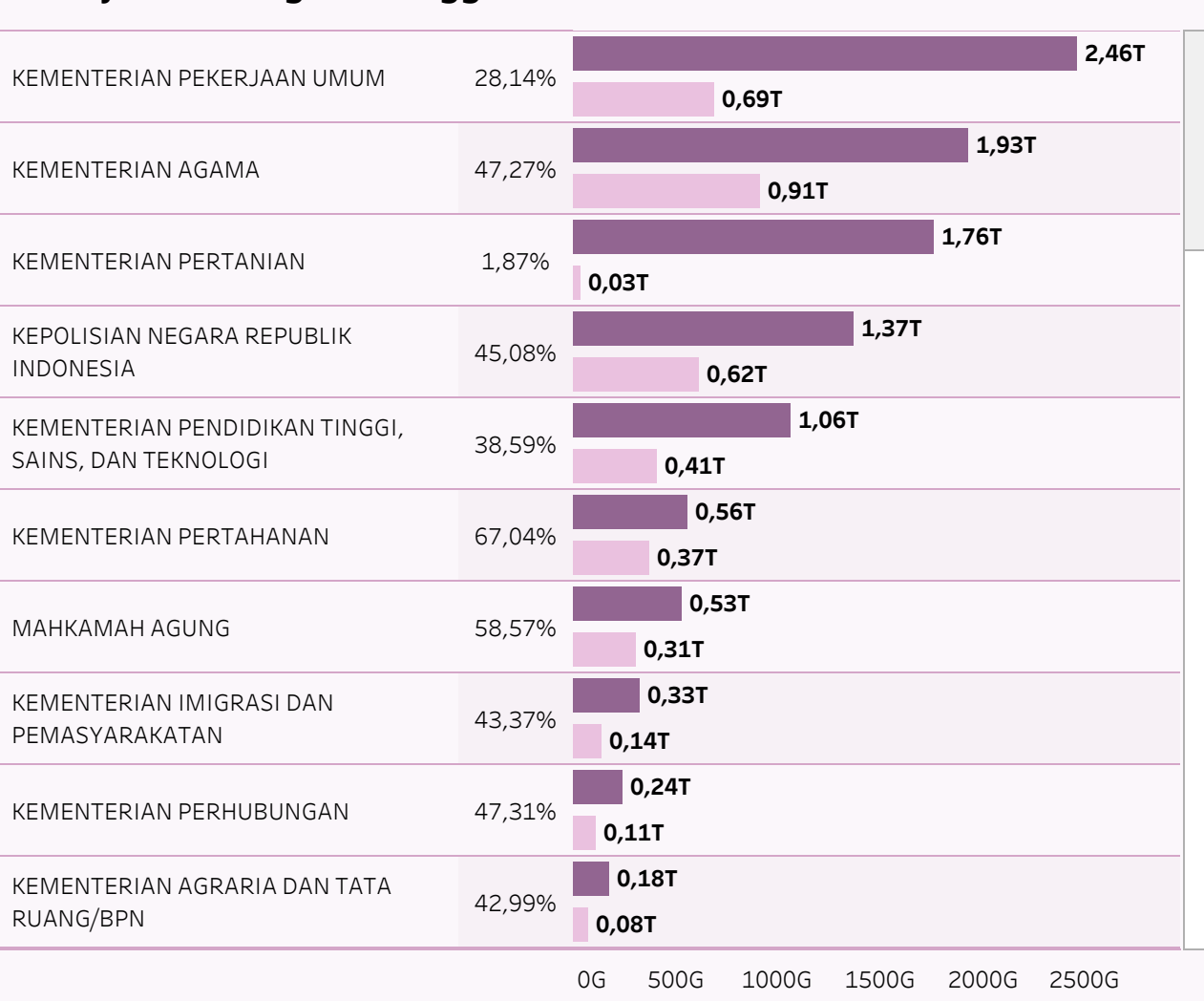
Pendapatan Regional

	Realisasi Y-1	Realisasi	% Growth
Provinsi Kalimantan Selatan	4,2T	5,7 T	▲34,66%
Grand Total	4,2T	5,7 T	▲34,66%

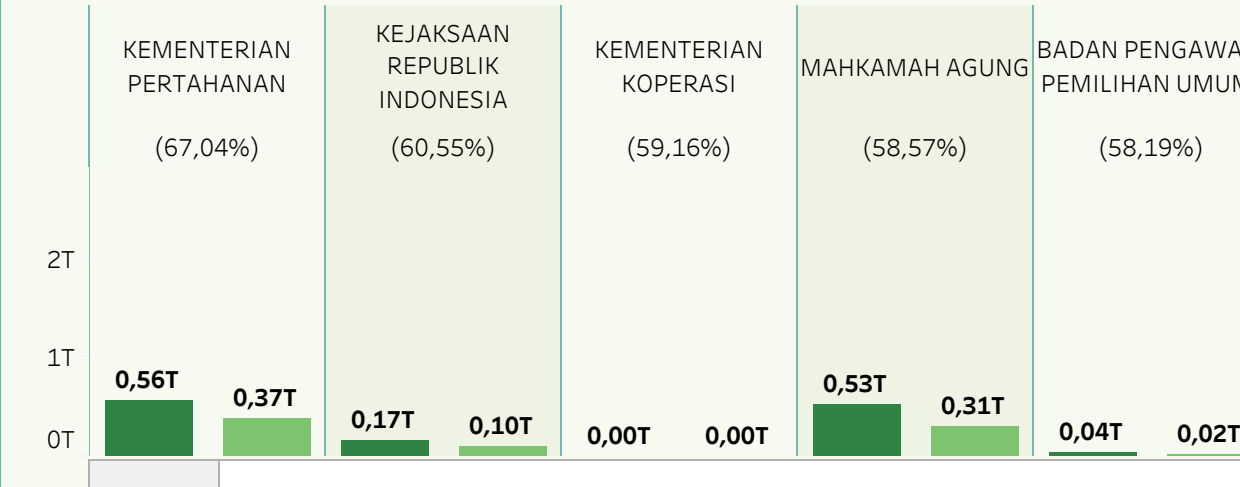
Belanja Regional

	Pagu Y-1	Realisasi Y-1	% thdp Pagu Y-1	Pagu	Realisasi	% thdp Pagu	% Growth
Provinsi Kalimantan Selatan	41,8T	14,0T	33,4%	30,0T	12,6 T	42,1%	▼9,63%
Grand Total	41,8T	14,0T	33,4%	30,0T	12,6 T	42,1%	▼9,63%

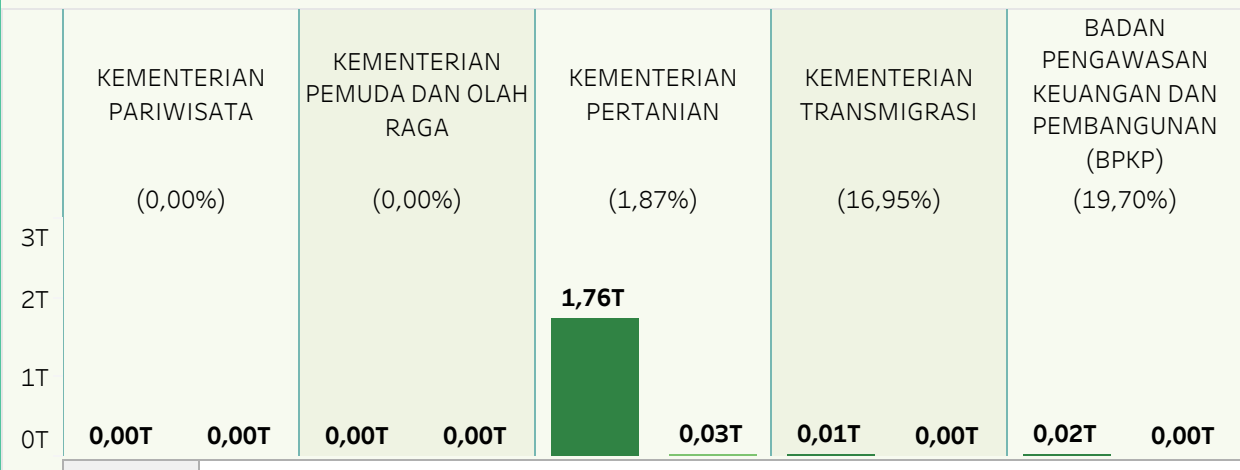
Kinerja 10 KL Pagu Tertinggi



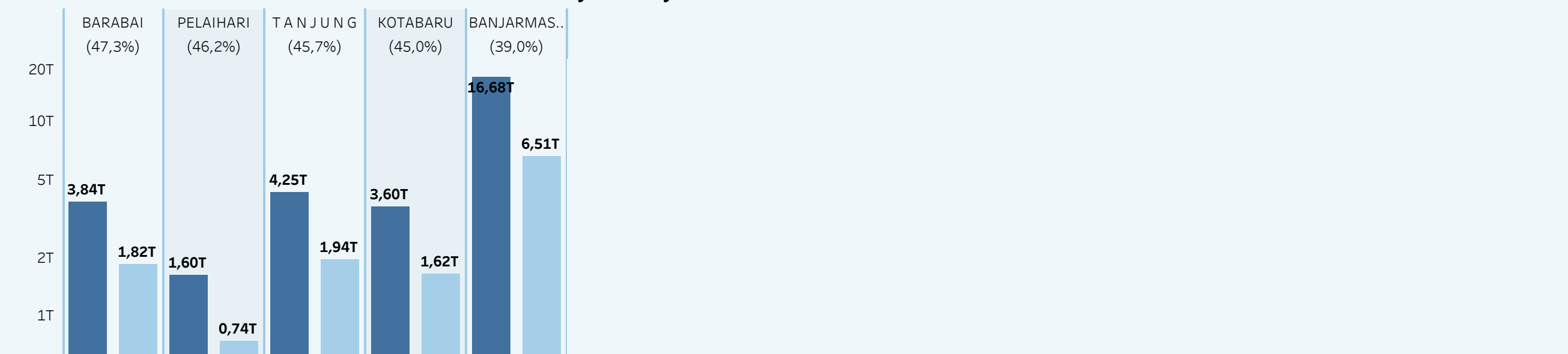
5 KL Persentase Realisasi Tertinggi



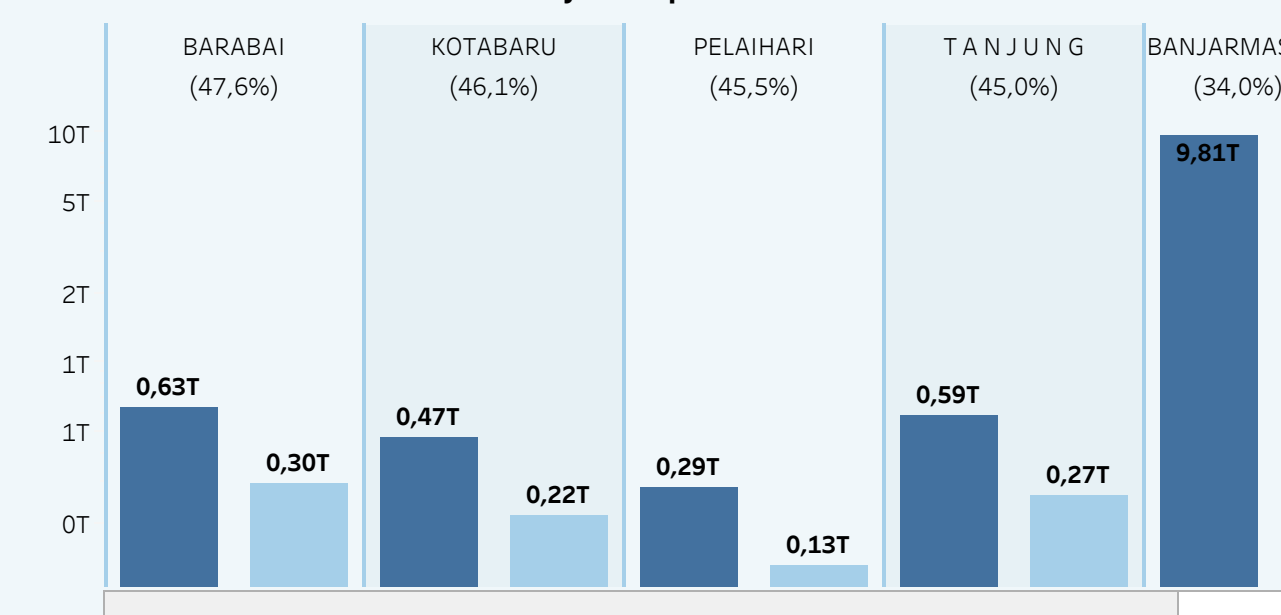
5 KL Persentase Realisasi Terendah



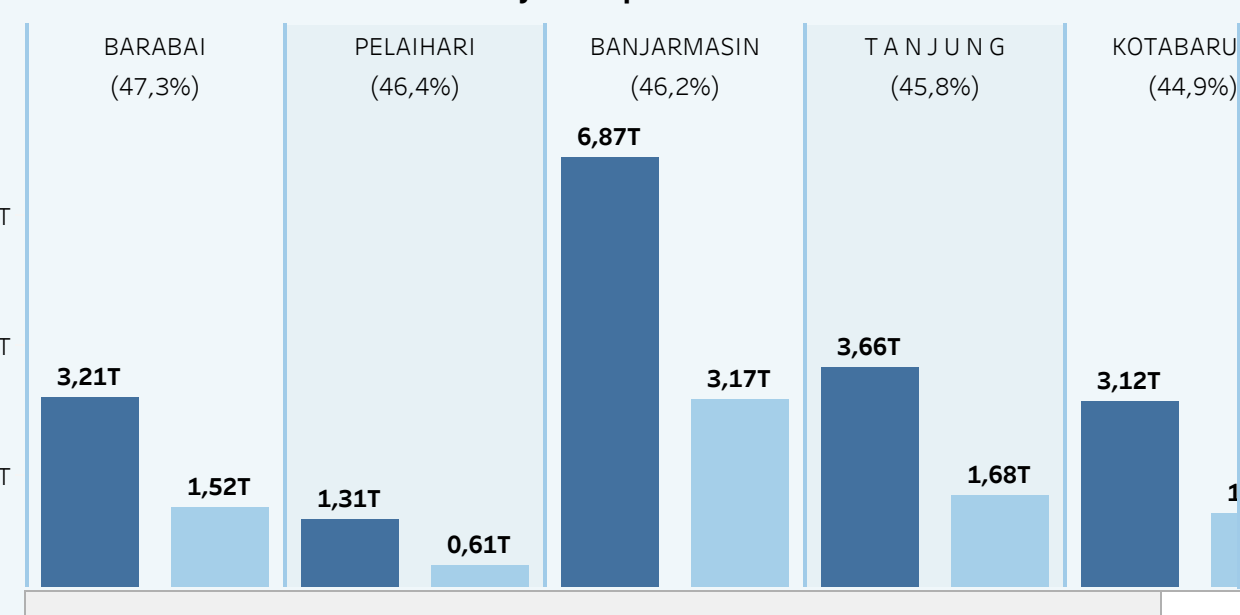
Kinerja Belanja KPPN



Kinerja BPP per KPPN



Kinerja TKD per KPPN



HASIL ANALISIS ISU FISKAL REGIONAL

Analisis Fiskal Regional

A | Perkembangan Pendapatan Negara s.d. 5 Juni 2026

Kinerja Pendapatan Negara sebesar Rp5,69 triliun (19,35%) dari target pendapatan negara sebesar Rp29,43 triliun. Realisasi tersebut tumbuh sebesar 34,66% yoy. Realisasi Pajak Dalam Negeri mencapai 24,67% (Rp4,23 triliun), Pajak Perdagangan Internasional mencapai 3,63% (Rp389,50 miliar), serta PNBPN mencapai 68,73% (Rp1,07 triliun). Pendapatan negara didominasi oleh Pajak Dalam Negeri (74,33%).

B | Perkembangan Belanja Negara s.d. 5 Juni 2026

1. Kinerja Belanja Negara sebesar Rp12,6 triliun (42,1%) dari pagu Rp30 triliun, berkontraksi 9,63% yoy. Realisasi Belanja Pemerintah Pusat mencapai 36,1% (Rp4,25 triliun) dari pagu Rp11,79 triliun, tumbuh 36% yoy dan Transfer ke Daerah mencapai 46,1% (Rp8,37 triliun) dari pagu Rp18,17 triliun, berkontraksi 22,8% yoy. Belanja Negara didominasi oleh Transfer ke Daerah (66,30%).

2. Kinerja Belanja 10 K/L Pagu Tertinggi, Kementerian PU merupakan K/L dengan pagu tertinggi yaitu Rp2,46 triliun, dengan realisasi mencapai 28,14% (Rp0,69 triliun). Kementerian Pertahanan menjadi K/L yang memiliki kinerja realisasi belanja tertinggi yaitu 67,04% (Rp0,37 triliun) dari pagu Rp0,56 triliun. Sementara, Kementerian Pertanian menjadi K/L yang memiliki kinerja realisasi belanja terendah dengan realisasi baru 1,87% (Rp0,03 triliun) dari pagu Rp1,76 triliun.

3. Kinerja Belanja 5 K/L Tertinggi dan Terendah, kinerja penyerapan tertinggi dicapai oleh Kementerian Pertahanan dengan realisasi 67,04% (Rp0,37 miliar) dari pagu Rp0,56 miliar. Sementara, terdapat 2 K/L yang belum merealisasikan anggaran belanja s.d. 05 Juni 2026 yaitu Kementerian Pariwisata dan Kementerian Pemuda dan Olahraga.

4. Kinerja KPPN, Kinerja penyerapan tertinggi dicapai oleh KPPN Barabai dengan realisasi sebesar 47,3 (Rp1,82 triliun) dari pagu Rp3,84 triliun. Sementara, kinerja penyerapan terendah berada di KPPN Banjarmasin dengan realisasi 39,0% (Rp6,51 triliun) dari pagu Rp16,68 triliun.

Isu dan Rekomendasi Fiskal Regional

A | Isu Pendapatan Negara, meliputi:

Realisasi PNBPN satker lingkup Kementerian ATR/BPN mengalami tekanan dikarenakan adanya kebijakan moratorium penandatanganan HGU baru, perpanjangan, dan pembaruan (layanan hak atas tanah), dan menurunnya pengajuan pinjaman masyarakat ke bank dengan jaminan sertifikat tanah dan bangunan (layanan pemeliharaan data pendaftaran tanah).

B | Rekomendasi Pendapatan Negara, diperlukan:

Satuan kerja Kementerian ATR/BPN perlu mengoptimalkan penerimaan dari layanan pertanahan lainnya yang masih memiliki potensi tinggi, seperti pemecahan dan penggabungan bidang tanah, peralihan hak (jual beli, hibah, dan waris), pengukuran dan pemetaan tanah, pembaruan data pertanahan, penerbitan informasi pertanahan dan SKPT, serta percepatan sertifikasi tanah untuk mendukung aktivitas investasi dan transaksi properti.

C | Isu Belanja Negara, meliputi:

Beberapa satuan kerja di lingkungan Kementerian ATR/BPN Provinsi Kalimantan Selatan memperoleh target pelaksanaan kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Desa/Kelurahan Lengkap Luar Jawa-Bali yang didanai melalui Pinjaman Luar Negeri (PLN). Dalam pelaksanaannya sesuai dengan perjanjian pinjaman, daftar penyedia barang dan jasa telah ditetapkan oleh pihak pemberi pinjaman sehingga fleksibilitas satker dalam menentukan penyedia menjadi terbatas. Di sisi lain, kapasitas penyedia yang ditunjuk belum mampu memenuhi seluruh kebutuhan pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh kantor pertanahan di seluruh Indonesia secara bersamaan, sehingga sebagian kegiatan harus menunggu jadwal pelaksanaan pada periode berikutnya. Kondisi ini berpotensi menyebabkan keterlambatan pencapaian target PTSL, menurunkan efektivitas pelaksanaan program, serta meningkatkan risiko tidak tercapainya target sertifikasi tanah sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

D | Rekomendasi Belanja Negara, diperlukan:

Kementerian ATR/BPN perlu melakukan koordinasi intensif dengan pihak pemberi pinjaman dan penyedia yang ditunjuk guna memperoleh kepastian jadwal pelaksanaan serta mendorong peningkatan kapasitas penyedia dalam memenuhi kebutuhan pekerjaan secara nasional. Selain itu, perlu dilakukan penyusunan prioritas lokasi dan tahapan pelaksanaan yang lebih terukur, penguatan monitoring dan evaluasi secara berkala, serta penyampaian laporan kendala kepada kementerian teknis dan pemberi pinjaman sebagai bahan pertimbangan untuk penyesuaian mekanisme pelaksanaan atau penambahan kapasitas penyedia.

HASIL ANALISIS MAKAN BERGIZI GRATIS (MBG)

Analisis MBG

Jumlah SPPG sebanyak 301 SPPG, jumlah supplier sebanyak 1.346 supplier, dan penerima manfaat sebanyak 704.761 penerima.

Isu dan Rekomendasi MBG

A | Isu MBG, meliputi:

Beberapa satuan kerja lingkup Ditjen Pemasaryakatan di Provinsi Kalimantan Selatan mendapatkan penugasan dari kantor pusat untuk membangun Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dengan mengoptimalkan keterlibatan tenaga kerja dari warga binaan pemsaryakatan sebagai bagian dari program pembinaan kemandirian. Namun, pelaksanaan penugasan tersebut masih menghadapi sejumlah kendala, terutama terkait ketersediaan lahan dan bangunan yang sesuai standar BGN serta belum adanya kejelasan mengenai sumber pendanaan atau modal usaha untuk mendukung operasional SPPG.

B | Rekomendasi MBG, diperlukan:

Kantor Pusat Ditjen Pemasaryakatan perlu segera melakukan koordinasi dengan BGN untuk menyusun rencana strategis dan pedoman teknis yang jelas sebagai acuan pelaksanaan pembangunan dan operasional SPPG oleh satker di daerah, berkordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan ketersediaan lahan, bangunan yang sesuai standar BGN, serta dukungan sumber pendanaan atau modal usaha yang memadai, serta mengedepankan prinsip akuntabilitas, transparansi, efisiensi, efektivitas, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

HASIL ANALISIS FLPP

Analisis FLPP

Jumlah unit yang dibangun meningkat dari 3.343 menjadi 3.500 unit, realisasi FLPP meningkat dari 2.616 unit menjadi 2.706 unit, jumlah lokasi realisasi FLPP meningkat dari 426 lokasi menjadi 433 lokasi, jumlah Kab./Kota yang ada program FLPP 13 Kab./Kota, dan jumlah nominal FLPP meningkat semula sebesar Rp343.867.850.250,- menjadi Rp355.736.645.250,-.

Isu dan Rekomendasi FLPP

A | Isu FLPP, meliputi:

Pelemahan nilai tukar rupiah mendorong kenaikan harga bahan bangunan sehingga meningkatkan biaya pembangunan rumah subsidi di Kalimantan Selatan. Sementara itu, harga jual rumah subsidi dibatasi oleh pemerintah sehingga tidak dapat menyesuaikan kenaikan biaya secara cepat. Kondisi ini menekan margin keuntungan developer, menyebabkan sebagian pengembang menunda atau mengurangi pembangunan rumah subsidi, yang pada akhirnya berpotensi menghambat pencapaian target Program Rumah Rakyat.

B | Rekomendasi FLPP, diperlukan:

Pemerintah perlu mempertimbangkan penyesuaian batas harga jual rumah subsidi secara berkala sesuai perkembangan biaya konstruksi, memberikan insentif atau stimulus kepada pengembang, serta mendorong penggunaan material lokal yang lebih kompetitif. Selain itu, perlu dilakukan penguatan koordinasi dengan perbankan dan pelaku usaha perumahan guna menjaga kelayakan usaha pengembang sekaligus memastikan ketersediaan pasokan rumah subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah.



RCE WEEKLY REPORT
KANWIL DJPB PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
Pemantauan Program Prioritas
Minggu ke-21



HASIL ANALISIS GIANT SEA WALL

Analisis Giant Sea Wall

Di Kalimantan Selatan tidak terdapat program prioritas Giant Sea Wall.

Isu dan Rekomendasi Giant Sea Wall

Di Kalimantan Selatan tidak terdapat program prioritas Giant Sea Wall.

HASIL ANALISIS KOPERASI DESA MERAH PUTIH

Analisis Koperasi Desa Merah Putih

Jumlah Koperasi sebanyak 2013

Koperasi telah memiliki akun sebanyak 2013

Koperasi telah memiliki NIB meningkat dari 1.629 menjadi 1.648

Koperasi telah memiliki NPWP sebanyak 2013

Koperasi telah RAT 2025 meningkat dari 1.566 menjadi 1.639

Simpanan pokok meningkat dari Rp1.711.566.110,- menjadi Rp1.714.491.110,-

Simpanan wajib meningkat dari Rp302.309.000,- menjadi Rp305.689.000,-

Volume transaksi tahun 2026 meningkat dari 5.995 menjadi 6.648

Nilai transaksi tahun 2026 meningkat dari Rp88.447.800,- menjadi Rp97.410.500,-.

Isu dan Rekomendasi Koperasi Desa Merah Putih

A | Isu Koperasi Desa Merah Putih, meliputi:

Seluruh Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Kabupaten Barito Kuala telah terbentuk secara kelembagaan dan sebagian telah mulai menjalankan aktivitas usaha, namun masih terdapat tantangan berupa belum tersedianya gerai fisik di sebagian besar desa serta belum meratanya kesiapan operasional koperasi.

B | Rekomendasi Koperasi Desa Merah Putih, diperlukan:

Perlu dilakukan percepatan pembangunan dan pemanfaatan gerai fisik secara bertahap di desa-desa yang belum memiliki sarana pendukung, disertai penguatan kapasitas pengelola koperasi melalui pendampingan usaha, peningkatan kompetensi manajerial, serta percepatan pemenuhan legalitas dan perizinan usaha.

HASIL ANALISIS SEKOLAH RAKYAT

Analisis Sekolah Rakyat

Target jumlah sekolah rakyat sebanyak 3 SR

Realisasi jumlah SR sd Saat ini yang sudah berjalan per jenjang sebanyak 13 Unit :

1. PAUD = 0 Unit
2. SD = 2 Unit
3. SMP = 6
4. SMA = 5

Isu dan Rekomendasi Sekolah Rakyat

A | Isu Sekolah Rakyat, meliputi:

Penyelesaian pembangunan Sekolah Rakyat sesuai jadwal yang ditetapkan menghadapi tantangan yang cukup signifikan akibat terbatasnya waktu pelaksanaan pekerjaan, serta belum optimalnya ketersediaan material dan tenaga kerja yang diperlukan. Kondisi tersebut berpotensi memengaruhi pencapaian target penyelesaian proyek tepat waktu.

B | Rekomendasi Sekolah Rakyat, diperlukan:

Diperlukan langkah-langkah percepatan penyelesaian proyek melalui optimalisasi jadwal kerja, penambahan dan pengaturan tenaga kerja sesuai kebutuhan, serta memastikan ketersediaan material konstruksi secara tepat waktu melalui penguatan koordinasi dengan pemasok. Selain itu, perlu dilakukan pemantauan dan evaluasi progres pekerjaan secara intensif, khususnya pada pekerjaan yang berada pada jalur kritis, sehingga kendala yang muncul dapat segera ditangani.

HASIL ANALISIS REVITALISASI SEKOLAH

Analisis Revitalisasi Sekolah

Target pelaksanaan Revitalisasi Sekolah TA 2026 sebanyak 39 Sekolah/Madrasah, yang sedang berjalan oleh Satker Kementerian Pekerjaan Umum sebanyak 29 Madrasah, dan sudah PKS melalui Ditjen PDM 10 sekolah.

Isu dan Rekomendasi Revitalisasi Sekolah

A | Isu Revitalisasi Sekolah, meliputi:

Terdapat kendala terkait ketersediaan material konstruksi dan tenaga kerja pada beberapa wilayah, yang dapat memengaruhi penyelesaian rehabilitasi ruang belajar, sarana sanitasi, dan fasilitas pendukung pendidikan lainnya sesuai target yang telah ditetapkan.

B | Rekomendasi Revitalisasi Sekolah, diperlukan:

Perlu memperkuat perencanaan dan pengendalian pelaksanaan pekerjaan melalui optimalisasi pengadaan material, pemetaan kebutuhan tenaga kerja secara lebih akurat, serta penyiapan alternatif pemasok dan sumber daya untuk mengantisipasi potensi keterlambatan. Selain itu, perlu dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap progres pekerjaan, khususnya pada lokasi yang menghadapi keterbatasan material dan tenaga kerja.

HASIL ANALISIS SMA UNGGUL GARUDA

Analisis SMA Unggul Garuda

Target Jumlah Sekolah Garuda

- a. Sekolah Garuda Transformasi sebanyak 1
- b. Sekolah Garuda Baru masih belum ada update

Realisasi Jumlah Sekolah Garuda sd saat yang sudah berjalan (unit)

- a. Sekolah Garuda Transformasi sebanyak 1 (SMAN Banua Kalsel)
- b. Sekolah Garuda Baru masih belum ada update

Isu dan Rekomendasi SMA Unggul Garuda

A | Isu SMA Unggul Garuda meliputi:

Penerimaan murid baru Tahun Ajaran 2026/2027 pada Program Sekolah Unggul Garuda di Kalimantan Selatan menjadi perhatian karena tingginya antusiasme pelajar berprestasi untuk masuk ke SMAN Banua Kalsel sebagai sekolah transformasi unggulan berbasis asrama dan penguatan sains-teknologi.

B | Rekomendasi SMA Unggul Garuda, diperlukan:

Diperlukan sistem seleksi yang transparan, objektif, dan inklusif agar dapat menjangkau siswa terbaik dari seluruh wilayah Kalimantan Selatan, termasuk daerah terpencil dan keluarga kurang mampu. pemerintah juga perlu mengantisipasi berbagai tantangan seperti keterbatasan daya tampung, pemerataan akses pendidikan unggul, peningkatan kualitas fasilitas asrama, serta penguatan kompetensi dan kesiapan tenaga pendidik.

HASIL ANALISIS KETAHANAN PANGAN

Analisis Ketahanan Pangan

Produksi Gabah Tahun 2026 sampai dengan saat ini mencapai 409.915,77 Ton. Alokasi dana program ketahanan pangan sebesar Rp1,93 triliun dan sudah terealisasi sebesar Rp78,23 miliar (4,05%).

Isu dan Rekomendasi Ketahanan Pangan

A | Isu Ketahanan Pangan meliputi:

Dari 13 kabupaten/kota di Kalimantan Selatan, baru 7 kabupaten/kota yang telah mengajukan usulan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk pelaksanaan Layanan Verifikasi dan Validasi Penerima Pupuk Bersubsidi pada Satuan Kerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Selatan. Kondisi ini berpotensi menghambat percepatan pelaksanaan proses verifikasi dan validasi data penerima pupuk bersubsidi.

B | Rekomendasi Ketahanan Pangan, diperlukan:

Perlu melakukan percepatan koordinasi dan fasilitasi kepada seluruh 13 kabupaten/kota untuk segera menyampaikan usulan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) guna mendukung pelaksanaan Layanan Verifikasi dan Validasi Penerima Pupuk Bersubsidi. Selain itu, diperlukan penetapan batas waktu yang jelas dan mekanisme monitoring berkala untuk memastikan seluruh daerah segera menindaklanjuti.

HASIL ANALISIS KETAHANAN ENERGI

Analisis Ketahanan Energi

Belum ada perubahan/tetap dibandingkan periode sebelumnya. Pemerintah Kab. HST sedang mengusulkan untuk pembangunan Bendungan Pancur Hanau senilai Rp30 miliar. Bendungan ini merupakan infrastruktur vital yang tidak hanya berfungsi sebagai penyedia air baku, irigasi, dan pengendali banjir, tetapi juga berperan penting dalam penyediaan energi.

Isu dan Rekomendasi Ketahanan Energi

A | Isu Ketahanan Energi, meliputi:

Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) terus mendorong penguatan ketahanan energi melalui pemanfaatan Energi Baru Terbarukan (EBT) dengan menginstruksikan para sekretaris kecamatan se-Kabupaten Hulu Sungai Tengah agar menjadi perpanjangan tangan pemerintah dalam implementasi program di tingkat wilayah.

B | Rekomendasi Ketahanan Energi, diperlukan:

Perlunya sinergi antara pemerintah daerah, kecamatan, hingga masyarakat dalam mengembangkan potensi energi terbarukan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST).